

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari seorang aparatur pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tugas ini sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ruang lingkup pelayanan umum (*public services*) meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas. Kebutuhan terhadap pelayanan umum oleh setiap anggota masyarakat dapat dimulai sejak seseorang masih dalam kandungan/rahim ibunya, yakni ketika seorang ibu hamil memeriksakan diri ke dokter, mengurus akta kelahiran, menempuh pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan formal, menikmati bahan makanan yang pasarnya dikelola oleh pemerintah, menempati rumah yang disubsidi pemerintah, memperoleh macam-macam perijinan yang berkaitan dengan dunia usaha yang digelutinya hingga seseorang meninggal.

Luasnya ruang lingkup pelayanan dan jasa publik cenderung sangat tergantung kepada ideologi dan sistem ekonomi suatu negara. Negara-negara

sosialis cenderung memiliki ruang lingkup pelayanan lebih luas dibandingkan negara-negara kapitalis. Tetapi luasnya cakupan pelayanan dan jasa-jasa publik seringkali tidak identik dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Karena pelayanan dan jasa publik merupakan suatu cara pengalokasian sumber daya melalui mekanisme politik, bukannya lewat pasar, maka kualitas pelayanan itu sangat tergantung kepada kualitas demokrasi. Konsekuensi dari hal ini adalah negara-negara yang pilar-pilar demokrasinya tidak bekerja secara optimal tidak memungkinkan pencapaian kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan publik tanpa proses politik yang demokratis cenderung membuka ruang bagi praktek-praktek korupsi.

Pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat merupakan hal penting karena pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan. Untuk memberikan pelayanan yang baik tentu dibutuhkan sumberdaya aparatur pemerintah yang baik pula. Namun pada kenyataannya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah yang ada masih rendah sehingga pelayanan belum optimal.

Pelayanan Program Keluarga Berencana oleh Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo merupakan hal penting karena dengan tingkat keikutsertaan masyarakat program KB harus merubah strategi dalam mengendalikan jumlah penduduk di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan program KB yaitu adanya desentralisasi membuat kebijakan nasional tidak serta merta dapat diterima masing-masing daerah, anggaran yang terbatas membuat sosialisasi KB harus

dapat dicari strategi dengan memanfaatkan elemen masyarakat lain dan anggaran yang efektif, dan *image* masyarakat harus diubah, tidak lagi membatasi kelahiran namun meningkatkan kualitas manusia, dan mensinergikan program KB dengan pandangan agama yang masih bertentangan. Disisi lain kurangnya tenaga medis yang menangani program KB serta masih mahalny pemasangan alat-alat kontraepsi tertentu. Selain itu juga promosi dan strategi program KB tidak bisa disamaratakan di semua daerah karena setiap daerah punya kondisi masalah yang spesifik sehingga membutuhkan solusi yang spesifik pula. Struktur organisasi Perwakilan BKKBN di daerah juga harus dibenahi guna mengefektifkan koordinasi dan pelaksanaan proram KB.

Kondisi tersebut di atas cukup mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam pelayanan program KB di Provinsi Gorontalo yang memerlukan pembenahan agar kedepan sedapat mungkin ditingkatkan. Bertolak dari pemaparan di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Pelayanan Program Keluarga Berencana Pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut :

- 1.2.1 Minimnya anggaran untuk Program Pelayanan KB.
- 1.2.2 Masih kuranya tenaga medis dan fasilitas yang menunjang dalam melakukan pelayanan Metode Operais Pria (MOP).

1.2.3 Masih mahalny pemasangan alat-alat kontrasepsi tertentu.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang perlu diuruskan dalam penelitian ini ialah bagaimana Pelayanan Metode Operasi Pria Pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Terkait dengan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu :

1.5.1 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang manajemen kebijakan program serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi peneliti-peneliti lainnya yang berminat di bidang ilmu tersebut.

1.5.2 Secara praktis, hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya pada Kantor

Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, dalam upaya meningkatkan pelayanan program keluarga berencana.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Objek Penelitian**

Dalam suatu penelitian penetapan yang menjadi lokasi tempat penelitian merupakan suatu keharusan yang mutlak bagi seorang peneliti untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang tempat/lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo .

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama dari penelitian adalah Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) Pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo.

### **1.6.2 Sumber Data**

1.6.2.1 Data Primer, merupakan informasi utama dalam penelitian, meliputi seluruh data yang diperoleh melalui kegiatan observasi dan dokumentasi serta data yang diperoleh dari informan melalui wawancara.

1.6.2.2 Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tertulis dan digunakan sebagai bahan pendukung terhadap objek penelitian dengan menggunakan berbagai referensi perpustakaan sebagai kerangka teori penelitian ini.

### 1.6.3 Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam pengumpulan data sebagai bahan untuk penulisan, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1.6.3.1 Observasi

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti guna menunjang data yang diperoleh untuk penelitian.

#### 1.6.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan alat utama dalam mengumpulkan data dan informasi dari objek yang diteliti. Dengan teknik ini peneliti berusaha mengadakan wawancara langsung dengan informan.

#### 1.6.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan-catatan, dokumen dan foto-foto sebagai pelengkap data primer yang berhubungan dengan penelitian.

### 1.6.4 Analisa Data

Menurut Sugiyono (1999) data kualitatif ialah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan gambar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Metode Operasi Pria (MOP) Pada kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo. Adapun menurut Sugiyono (1999) langkah-langkah untuk

menganalisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Mengedit data penelitian di lapangan, yaitu setiap data yang terkumpul pengeditan langsung dilakukan.
2. Melakukan reduksi data dengan membuat abstraksi dalam usaha membuat rangkuman data.
3. Mengkategorikan satuan-satuan yang menyangkut sumber, informan, serta memilah-milah menjadi kategori tertentu yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat dan kriteria tertentu.
4. Penafsiran data, yaitu setiap data yang terkumpul langsung dilakukan penafsiran data tersebut sehingga pada setiap data yang terkumpul peneliti berusaha agar dapat dijadikan data yang bermakna.
5. Menguji keabsahan data. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif seperti kredibilitas dan validitas, peneliti melakukan peninjauan ulang di lapangan pada waktu dan situasi berbeda.
6. Mengambil kesimpulan, yaitu dengan berupaya mencari makna data yang dikumpulkan dan dianalisis.

#### 1.6.5 Waktu Penelitian

Dalam suatu penelitian penetapan alokasi waktu penelitian merupakan suatu keharusan yang mutlak bagi seorang peneliti untuk mengetahui gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo dan alokasi

waktu yang telah digunakan pada saat penelitian yakni selama 2 bulan. Observasi awal dilakukan pada hari Senin 18 Maret 2013. Setelah itu penelitian tindakan pada hari Jumat, 25 – 18 April 2013.